

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



**DINAS
PETERNAKAN
DAN
KESEHATAN
HEWAN
PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2018 S/D TRIWULAN II TAHUN 2019
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **5 AGUSTUS 2019**



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **5 AGUSTUS 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR **35**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jln. Patimura No.2, Telp. (0761) 22817, 44341,44343 Fax.44342
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ROVINSI RIAU

Nomor : 524/KPTS/PKH/SEKR/VIII/2019/1482

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ROVINSI RIAU
TAHUN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737)
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No 14, Tamabahan Lembaran Negara RI nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Rencana Kerja (renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau agar menjadikan Renja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 13 Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Ir. ELLY SURYANI, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19660705 199203 2 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja 2020 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja PD tahun sebelum dan Renstra PD tahun 2019-2024.

Penyusunan Renja 2020 ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan Renja ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau.

Pekanbaru, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Ir. ELLY SURYANI, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19660705 199203 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2017	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Riau.....	8
2.2 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019.....	15
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	27
2.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020 Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	30
3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024	35
3.2 Rumusan Program Kegiatan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021	39
4.1 Rencana Program/Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2020.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyiapkan Rencana Kerja (Renja) PD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pokok-pokok isi dokumen Renja PD, waktu pelaksanaan Musrenbang Daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja PD, Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja PD.

Proses penyusunan Renja sesuai ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa Renja PD dengan dokumen RKPD dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas atau PD Tahun 2019-2024, disamping itu Renja PD juga bersinergi dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menyusun Renja Tahun 2020 yang berfungsi menerjemahkan mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi

kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD mengacu pada RPJMD Provinsi Riau. Renja PD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 14) Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- 15) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2019 - 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2020 yang dituangkan dalam program dan kegiatan PD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan PD dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, serta memuat usulan dari masyarakat yang tertuang didalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang gambaran umum penyusunan Rancangan Renja PD ; latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, mengacu pada APBD tahun berjalan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD
2. Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD tahun 2020 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi PD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel T-C.29)**

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 2019		
								Target Renja PD 2018	Realisasi Renja PD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0					Non Urusan									
0	0				NON URUSAN									
0	0	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik								
0.00	00	001	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim (surat)	6,600 surat	700	900	450	50.00	2,000 surat	3,150	47.73	
0.00	00	001	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan (rekening)	10 rekening	4	3	3	100.00	4 rekening	11	110.00	
0.00	00	001	0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	232 unit	75	71	64	90.14	90 unit	229	98.71	
0.00	00	001	0007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan (orang/bulan)	72 orang/bulan	12	24	24	100.00	20 orang/bulan	56	77.78	
0.00	00	001	0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan (orang/hari)	6,600 orang/hari	12	2,376	2,376	100.00	2,640 orang/hari	5,028	76.18	
0.00	00	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	97 jenis	12	29	29	100.00	33 jenis	74	76.29	
0.00	00	001	011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang digandakan	81 jenis	12	29	29	100.00	29 jenis	70	86.42	
0.00	00	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan (unit)	56 unit	12	15	15	100.00	24 unit	51	91.07	
0.00	00	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	12 jenis	25	4	4	100.00	2 jenis	31	258.33	
0.00	00	001	016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (Bulan)	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12	100.00	
0.00	00	001	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat (porsi)	3,070 porsi	1	2,825	2,486	88.00	2,575 porsi	5,062	164.89	
0.00	00	001	018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	421 kali	12	116	113	97.41	166 kali	291	69.12	
0.00	00	001	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang/hari)	7,560 orang/hari	7	2,520	2,520	100.00	3,285 orang/hari	5,812	76.88	

0.00	00	001	022	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah informasi yang dipublikasikan (kali)	55 kali	-	19	13	68.42	75 kali	88	160.00
0.00	00	001	299	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	Jumlah Renstra (Dokumen)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1	100.00
0.00	00	001	300	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja (Dokumen)	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4	100.00
0.00	00	001	301	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2	100.00
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja								
0.00	00	002	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan (unit)	112 unit	47	30	30	100.00	22 unit	99	88.39
0.00	00	002	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur yang diadakan (Unit)	33 Unit	-	-	-	-	33 Unit	33	100.00
0.00	00	002	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	2 unit	-	1	-	-	1 unit	1	50.00
0.00	00	002	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara (unit)	18 unit	-	9	8	88.89	5 unit	13	72.22
0.00	00	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	20 unit	6	7	6	85.71	8 unit	20	100.00
0.00	00	002	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	129 unit	92	18	18	100.00	18 unit	128	99.22
0.00	00	002	043	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab (Unit)	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1	100.00
0.00	00	002	131	Pengamanan Aset Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di inventarisasi, di nilai, diamankan, ditertibkan dan dipelihara	52 unit	-	-	-	-	52 unit	52	100.00
0.00	00	002	199	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah Sarana dan Prasarana Arsip	9 buah	-	-	-	-	9 buah	9	100.00
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur								
0.00	00	003	0006	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah pelaksanaan senam dan ceramah agama (kali)	170 kali	190	49	49	100.00	74 kali	313	184.12
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara								
0.00	00	005	0001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	198 orang	48	35	22	62.86	54 orang	124	62.63
0.00	00	005	018	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan non formal (orang)	51 orang	-	1	-	-	50 orang	50	98.04

2	3	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia Lokal								
2.00	03	15	017	Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Peternakan (SMD)	Jumlah lembaga (kelompok) agribisnis peternakan yang dikembangkan oleh SMD (kelompok)	48 kelompok	47	16	16	100.00	- kelompok	63	131.25
2.00	03	15	018	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Unit pengolahan limbah ternak (unit)	45 unit	15	23	-	-	- unit	15	33.33
2	3	21		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak								
2.00	03	21	0001	Pendataan Masalah Peternakan	Terlaksananya buku statistik peternakan dan data base peternakan	6 Dokumen	2	2	2	100.00	3 Dokumen	7	116.67
2.00	03	21	0002	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah penanganan kesehatan ternak (ekor)	12,924 ekor	10,649	7,500	7,500	100.00	- ekor	18,149	140.43
					Jumlah Check Point yang dioperasikan (check point)	5 ekor	-	-	-	-	5 ekor	5	100.00
2.00	03	21	0007	Pengadaan Obat Hewan	Jumlah obat hewan dan vaksin (dosis)	165,000 dosis	55,000	65,000	65,000	100.00	79,000 dosis	199,000	120.61
2.00	03	21	0008	Penanggulangan Rabies dan SE	Jumlah penanganan kasus dan SE (kasus)	96 kasus	-	32	32	100.00	- kasus	32	33.33
					Jumlah Vaksin dan Operasional Rabies (Dosis)	25,700 dosis	5,500	-	-	-	20,200 dosis	25,700	100.00
2.00	03	21	009	Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan kualitasnya (puskesmas)	180 puskesmas	60	70	68	97.14	- puskesmas	128	71.11
					Jumlah Pelayanan di Puskesmas (ekor)	12,000 ekor					12,000 ekor	12,000	100.00
2.00	03	21	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. UPT LVKH	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium UPT. LVKH yang diadakan	3 unit	1	4	4	100.00	- unit	5	166.67
2.00	03	21	011	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Klinik UPT LVKH)	Jumlah hewan yang ditangani aktif dan pasif produk asal hewan (ekor)	3,300 ekor	1,100	1,100	3,806	346.00	- ekor	4,906	148.67
2.00	03	21	012	Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamatan Produksi Hasil	Jumlah spesimen hewan dan sampel produk asal hewan (sampel)	54,000 sampel	18,850	20,000	78,762	393.81	18,000 sampel	115,612	214.10
2.00	03	21	013	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	Jumlah penanganan kasus gangguan reproduksi (kasus)	5,862 kasus	1,862	1,000	1,171	117.10	2,000 kasus	5,033	85.86
2.00	03	21	019	Pengawasan Peredaran Produk Pangan Asal Hewan dan Non Pangan Asal Hewan	Jumlah unit usaha yang diawasi penerapan penjaminan produk hewan	60 unit usaha	-	30	30	100.00	26 unit usaha	56	93.33
2.00	03	21	020	Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis	Jumlah unit usaha yang diawasi dari aspek kesrawan dan zoonosis (unit)	140 unit	-	-	-	-	70 unit	70	50.00
					Jumlah ternak yang diawasi di RPH, TPH dan non RPH (ekor)	3,700 ekor	-	3,700	2,219	59.97	- ekor	2,219	59.97
2.00	03	21	021	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSH	Jumlah sarana dan prasarana UPT RSH yang diadakan	14 Unit					14 Unit	14	100.00
2.00	03	21	022	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan UPT. RSH	Jumlah Hewan yang Diobati dan Divaksinasi (Ekor)	1,500 ekor					1,500 ekor	1,500	100.00

2	3	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi daging								
2.00	03	22	0001	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak	Jumlah sarana dan prasarana UPT. Pembibitan Ternak yang diadakan (unit)	47 unit	1	86	39	45.35	- unit	40	85.11
2.00	03	22	0002	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	Jumlah bibit ternak yang dipelihara (ekor)	862 ekor	212	200	269	134.50	230 ekor	711	82.48
2.00	03	22	0008	Pengembangan Agribisnis Pertenakan	Jumlah ternak sapi model integrasi (ekor)	2,723 ekor	353	870	870	100.00	95 ekor	1,318	48.40
2.00	03	22	009	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Frekuensi monev (kali)	56 kali	3	24	12	50.00	24 kali	39	69.64
2.00	03	22	011	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Jumlah sarana dan prasarana UPT Lab. Pakan	3 Paket	-	-	-	-	3 Paket	3	100.00
2.00	03	22	015	Pengembangan Produksi Semen Beku	Jumlah straw yang diproduksi (dosis)	100,000 dosis	40,807	20,000	20,071	100.36	40,000 dosis	100,878	100.88
2.00	03	22	016	Monitoring dan Evaluasi Straw UPT BIBD	Frekuensi monev straw (kali)	32 kali	2	10	10	100.00	- kali	12	37.50
2.00	03	22	017	Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Pada Masyarakat	Jumlah pendamping teknis peternakan (orang)	225 orang	75	75	75	100.00	75 orang	225	100.00
2.00	03	22	019	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah kebuntingan ternak hasil IB (ekor)	65,000 ekor	20,000	23,000	23,000	100.00	4,896 ekor	47,896	73.69
2.00	03	22	020	Pengembangan budidaya ternak ruminansia	Jumlah kelompok ternak ruminansia yang menerapkan GFP (kelompok)	135 kelompok	192	30	30	100.00	25 kelompok	247	182.96
2.00	03	22	024	Pemutakhiran Data Teknis Peternakan dan Keswan	Jumlah Dokumen (buku)	3 buku	1	1	1	100.00	2 buku	4	133.33
2.00	03	22	029	Pendistribusian Ternak Kerbau	Jumlah ternak kerbau (ekor)	175 ekor	20	70	70	100.00	- ekor	90	51.43
2.00	03	22	035	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak	Jumlah bibit BPT yang dihasilkan (batang)	1,020,000 batang	20	500,000	420,000	84.00	1,020 batang	421,040	41.28
2.00	03	22	036	Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan SPR yang dibina (SPR)	23 SPR	10	3	3	100.00	3 SPR	16	69.57
2.00	03	22	037	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana IB yang disediakan (unit)	20,524 unit	14,900	9,000	9,000	100.00	1,064 unit	24,964	121.63
2.00	03	22	039	Pendistribusian Ternak Kambing	Jumlah ternak kambing (ekor)	2,010 ekor	240	1,170	1,020	87.18	- ekor	1,260	62.69
2.00	03	22	042	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Iseminasi Buatan	Jumlah sarana dan prasarana UPT IB yang disediakan (unit)	80 unit	1	50	23	46.00	20 unit	44	55.00
2.00	03	22	043	Penguatan Pembibitan Ternak	Jumlah kelompok yang melaksanakan GBP (kelompok)	12 kelompok	-	6	4	66.67	- kelompok	4	33.33
					Jumlah Ternak yang ber SKLB (ekor)	500 ekor	-	-	-	-	500 ekor	500	100.00
2.00	03	22	044	Pengembangan Pakan	jumlah pakan yang Revitalisasi (unit)	17 unit	-	5	2	40.00	- unit	2	11.76
2.00	03	22	045	Pendistribusian Ternak Sapi kepada Masyarakat	Jumlah Ternak Sapi yang didistribusikan (Ekor)	2,357 ekor	-	1,770	465	26.27	165 ekor	630	26.73
2.00	03	22	046	Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan	Jumlah Kelompok yang diverifikasi (kelompok)	300 kelompok	-	150	44	29.33	150 kelompok	194	64.67
2.00	03	22	047	Monitoring dan Evaluasi Straw UPT. IBT	Frekuensi Monev Straw (Kali)	2 Kali	-	-	-	-	2 Kali	2	100.00

2	3	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah kelompok yang mendapatkan akses pemasaran								
2.00	03	23	0007	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah Promosi (Kali)	5 kali	-	1	1	100.00	- kali	1	20.00
2.00	03	23	015	Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil	Jumlah sarana dan prasarana (unit)	21 unit	-	23	20	86.96	- unit	20	95.24
2.00	03	23	016	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah Promosi (kali)	1 Kali					1 Kali	1	100.00
2.00	03	23	028	Peningkatan Pelayanan UPT Plaza Ternak	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi (orang)	105 orang	30	24	24	100.00	- orang	54	51.43
2.00	03	23	031	Pembinaan Manajemen dan Kemitraan Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha yang melakukan kemitraan (orang)	110 orang	-	50	50	100.00	- orang	50	45.45
2.00	03	23	032	Penguatan Permodalan Kelompok Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi ke lembaga pembiayaan (unit usaha)	100 unit usaha	-	40	40	100.00	- unit usaha	40	40.00
					Jumlah Polis Asuransi Ternak (Ekor)	3,000 ekor	-	-	-	-	3,000 ekor	3,000	100.00
2.00	03	23	034	Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Hygiene Sanitasi	Penerapan penjaminan produk hewan yang asuh (unit usaha)	60 unit usaha	-	30	30	100.00	19 unit usaha	49	81.67

Dari tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, namun terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target.

1) Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 memiliki 8 Program yang terdiri dari 4 Program Non Urusan dengan 21 Kegiatan dan 4 Program Urusan Pilihan Pertanian dengan 39 kegiatan dengan Program yang terdiri dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan.

Pada Program Non Urusan yang terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan hasil hampir seluruh kegiatan pada program tersebut telah mencapai target. Dari 21 Kegiatan, hanya terdapat 6 kegiatan yang tidak mencapai target yakni pada kegiatan Penyediaan Surat Menyurat dengan tingkat realisasi 50%, Penyediaan Makanan dan Minuman 88%, Kegiatan Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan SKPD 68,42%, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 88,89%, Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 85,71%, dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 62,86%.

Sementara pada Program Urusan Pilihan Pertanian terdapat 11 kegiatan yang tidak mencapai target yakni kegiatan Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis dengan realisasi 59,97%, Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak 45,35%, Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50%, Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak 84%, Kegiatan Pendistribusian Ternak Kambing 87,18%, Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Iseminasi Buatan 46%, Kegiatan Penguatan Pembibitan Ternak 66,67%, Kegiatan Pengembangan Pakan 40%, Kegiatan Pendistribusian Ternak Sapi kepada Masyarakat 26,27%, Kegiatan Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan 29,33%, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 86,96%.

2) Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Dari 60 Kegiatan sebagian besar realisasi kinerjanya telah mencapai target kecuali pada 17 Kegiatan yang terdiri 6 kegiatan pada Program Non urusan dan 11 Kegiatan pada Program di Urusan Pertanian.

3). Realisasi Program /Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Terdapat 4 kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan yakni kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Klinik UPT LVKH) dengan target kinerja jumlah hewan yang ditangani aktif dan pasif sebanyak 1.100 ekor dengan realisasi 3.806 ekor atau 346%, Kegiatan Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamatan Produksi Hasil Hewan dengan target jumlah spesimen hewan dan sampel produk asal hewan yang diamati sebanyak 20.000 sampel dengan realisasi 78.762 sample atau 399,81%, Kegiatan Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan dengan target jumlah penanganan kasus gangguan reproduksi sebanyak 1.000 kasus dengan realisasi 1.171 kasus atau 117,10%, dan Kegiatan Pembibitan Dan Perawatan Ternak dengan target jumlah bibit ternak yang dipelihara sebanyak 200 ekor dengan realisasi 269 ekor atau 134,5%.

4). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Pada kegiatan Pendistribusian ternak kambing realisasi fisik tidak mencapai 100% dikarenakan ada 150 ekor ternak kambing yang tidak jadi dilelang karena kelompok penerima kegiatan dimaksud mengundurkan diri dan kegiatan pertemuan peternak tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi akibat kondisi keuangan daerah.

Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak realisasi fisik hanya 45,35% disebabkan ketidakpastian anggaran APBD TA 2018 yang menyebabkan keterlambatan proses pencairan dana pekerjaan perencanaan di BPKAD yang menyebabkan keterlambatan waktu dimulainya tahap-tahap pekerjaan fisik sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan fisik tersebut. Ada 16 kegiatan pengadaan fisik yang pekerjaannya telah

selesai dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan karena potensi tunda bayar dan keterbatasan waktu pelaksanaan yang tersisa di tahun anggaran.

Pada kegiatan-kegiatan yang melebihi target umumnya adalah karena kegiatan tersebut merupakan pelayanan kesehatan berdasarkan permintaan atau kasus penyakit yang terjadi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditentukan di dalam Draft Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (**Tabel T-C.30**)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan			NA	111	113	115	109,86	-	-	-	Analisis terhadap capaian indikator kinerja tahun 2018 belum dapat dilakukan karena indikator ini merupakan indikator baru yang berbeda dengan indikator renstra sebelumnya (renstra 2014-2019).
2	Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal (Ton)			NA	2,253.70	2,338.30	2,426.20	2,214.73	-	-	-	
3	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)			NA	94.50	95.20	95.90	94%	-	-	-	
4	Persentase Angka Kematian Ternak (%)			NA	5%	4.50%	4%	2,3%	-	-	-	
5	Populasi Ternak (ekor)			NA	483,452	500,514	518,189	469,151	-	-	-	

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang tertera pada Tabel 2.2. belum dapat dilakukan karena indikator yang digunakan merupakan indikator baru berdasarkan Draft Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang pada tahun 2018 target indikator ini belum ditetapkan. Begitu juga dengan capaian kinerja tahun 2019 belum dapat di analisis disebabkan oleh proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan pada awal tahun berjalan, yaitu pada akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2019.

Perubahan indikator dari NTP menjadi NTUP dikarenakan NTP memiliki kelemahan karena NTP yang dihitung dari rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani, yang mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk biaya produksi, sekolah, berobat, membeli sandang, papan dan lainnya sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil dari usahanya. Oleh karena itu, maka digunakan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian. NTUP di atas 100 menunjukkan petani surplus, sama dengan 100 berarti impas dan di bawah 100 berarti petani rugi/defisit.

Pada penghitungan produksi daging ruminansia lokal yang dihitung adalah produksi daging ruminansia dari ternak yang berasal dari lokal saja, bukan dari ternak yang didatangkan atau daging yang didatangkan dari luar Provinsi Riau. Adapun daging ruminansia lokal yang dihitung adalah berasal dari ternak sapi, kerbau dan kambing. Pada periode renstra 2014-2019, produksi daging yang dihitung adalah produksi daging dari pemotongan ternak secara keseluruhan baik dari ternak lokal maupun ternak yang didatangkan dari luar.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2016 dan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat menjadi salah satu tumpuan dalam percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Riau. Pembangunan sub sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki serta meningkatkan gizi masyarakat, juga merupakan sumber pendapatan masyarakat.

Untuk melihat perkembangan pembangunan peternakan di Provinsi Riau selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1a, Tabel 2.3.1b dan Tabel 2.3.1c.

Tabel 2.3.1a
Populasi Ternak Tahun 2014 – 2018 di Provinsi Riau

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.	Sapi potong	217.652	229.634	231.860	238.190	250.208	3,56
2.	Sapi Perah	143	140	132	92	96	(8,44)
3.	Kerbau	43.163	39.367	33.855	34.542	36.288	(3,93)
4.	Kambing	184.899	195.827	180.671	199.037	210.987	3,59
5.	Domba	8.242	7.354	9.225	13.632	14.834	17,81
6.	Babi	47.324	48.033	47.543	48.637	50.583	1,7
7.	Kuda	26	34	56	62	62	26,55
8.	Ayam Buras	3.327.820	3.746.784	5.372.975	6.175.056	6.422.060	18,73
9.	Ayam Ras Petelur	67.798	65.628	162.285	158.389	164.725	36,42
10.	Ayam ras Pedaging	39.987.136	39.304.056	46.266.787	46.980.702	48.859.930	5,39
11.	Itik	289.238	259.363	244.039	230.560	239.783	(4,44)
12.	Kelinci	2.849	3.488	2.518	2.626	2.731	0,73
13.	Puyuh	123.996	141.323	124.992	125.382	130.398	1,68
14.	Merpati	11.647	17.760	12.863	16.354	17.008	14,01
15.	Itik Manila	33.031	47.524	49.052	50.664	52.691	13,59

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2018.

*Ket: *)angka sementara.*

Pada Tabel 2.3.1a terlihat bahwa populasi beberapa komoditas peternakan dari tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan peningkatan, diantaranya populasi sapi potong dari 217.652 ekor pada tahun 2014 menjadi 250.208 ekor tahun 2018, populasi kambing pada tahun 2014 sebesar 184.899 ekor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 telah mencapai 210.987 ekor, dan ayam buras dari 3.327.820 ekor tahun 2014 menjadi 6.422.060 ekor tahun 2018. Demikian pula untuk populasi ayam pedaging 39.987.136 ekor pada tahun 2014 meningkat menjadi 48.859.930 ekor pada tahun 2018. Komoditas sapi potong, kambing dan ayam pedaging sangat prospektif kedepan karena pasar yang cukup terbuka dengan adanya peminat dalam daerah, luar daerah dan dari

negara lainnya. Namun ada juga beberapa komoditas peternakan yang mengalami penurunan jumlah populasinya diantaranya sapi perah dan kerbau.

Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan populasi tahun 2014-2018 terlihat bahwa sebagian besar jenis ternak mengalami pertumbuhan positif diantaranya populasi sapi potong memiliki tingkat pertumbuhan 3,56%, kambing 3,59%, domba 17,81%, ayam buras 18,73% dan ayam petelur 36,42% serta ayam ras pedaging 5,39%. Namun terdapat juga jenis ternak yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif yakni sapi perah, kerbau dan itik.

Tabel 2.3.1b.
Pemotongan Ternak Tahun 2014 – 2018 di Provinsi Riau

No	Jenis Ternak	Pemotongan (ekor)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sapi potong	56.245	53.102	62,444	54,034	56,195	0,63
2.	Sapi Perah	-	-	-	-	-	-
3.	Kerbau	10.577	10.358	11,781	9,007	9,368	(1,97)
4.	Kambing	55.188	63.84	65,641	70,658	73,484	7,54
5.	Domba	1.036	1.202	1,370	1,474	1,533	10,40
6.	Babi	31.182	30.606	17,065	21,173	22,020	(4,5)
8.	Ayam Buras	4,074,943	4,937,768	3,920,527	3,947,416	4,105,312	1,31
9.	Ayam Ras Petelur	346,110	1,006,666	370,650	704,753	732,943	55,45
10.	Ayam ras Pedaging	31,017,744	40,543,940	42,768,292	48,409,615	50,345,999	13,35
11.	Itik	288,021	298,034	272,499	339,229	352,797	5,85
13.	Puyuh	74,398	13,140	74,995	39,807	41,399	86,37
15.	Itik Manila	19,819	6,205	11,301	20,065	20,867	23,75

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2018.

Ket: *)angka sementara.

Dari data Tabel 2.3.1b. terlihat bahwa jumlah pemotongan ternak sebagian besar komoditas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa permintaan akan komoditas peternakan yang terus meningkat. Peningkatan permintaan inilah yang bisa menjadi dasar untuk

pembangunan peternakan ke depan sehingga provinsi Riau dapat memenuhi permintaan pasar.

Tabel 2.3.1c.
Produksi Daging Tahun 2014 – 2018 di Provinsi Riau

No	Jenis Ternak	Daging (kg)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sapi potong	8,676,703	9,297,618	9,396,286	7,700,427	8,008,444	(1,46)
2.	Sapi Perah						
3.	Kerbau	1,813,239	1,839,675	2,074,966	1,579,985	1,643,185	(1,40)
4.	Kambing	648,242	620,342	652,278	729,620	758,805	4,18
5.	Domba	15,779	13,461	15,715	19,084	19,847	6,87
6.	Babi	2,058,969	2,127,926	1,127,715	1,360,000	1,414,400	(4,76)
7.	Ayam Buras	5,613,968	4,043,996	4,178,656	4,137,169	4,302,656	(5,41)
8.	Ayam Ras Petelur	1,262,181	501,706	499,175	929,573	966,756	7,37
9.	Ayam ras Pedaging	45,307,621	40,731,586	47,575,101	54,094,654	55,684,294	5,84
10.	Itik	292,575	282,502	266,426	333,179	346,507	4,98
11.	Kelinci	-	-	-	-	-	
12.	Puyuh	11,667	8,184	3,205	3,981	4,140	(15,62)
13.	Merpati	-	-	-	-	-	
14.	Itik Manila	6,205	21,800	11,385	20,958	21,286	(72,30)
	Jumlah	65,707,148	59,488,796	65,800,908	70,908,630	73,170,319	

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2018.

Ket: *)angka sementara.

Dari tabel 2.3.1.c dapat dilihat bahwa produksi daging secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 65.707.148 kg pada tahun 2014 menjadi 73.170.319 kg pada tahun 2018. Pada komoditas tertentu seperti sapi potong dan kerbau pada tahun 2017 mengalami penurunan namun produksi kembali meningkat pada tahun 2018. Produksi daging Sapi tahun 2018 adalah sebesar 8.008.444 kg dan produksi daging ayam ras pedaging tahun 2018 sebesar 55.684.294 kg.

Upaya untuk mewujudkan pengembangan peternakan berkelanjutan dilaksanakan dengan pengembangan kawasan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektifitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan. Pengembangan kawasan peternakan ini dituangkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Peternakan.

Pendekatan kawasan peternakan dilaksanakan pada kawasan usaha peternakan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh agrosistem yang sama sedemikian rupa mencapai skala ekonomi dan terhubung dengan aksesibilitas memadai. Luas agregat kawasan untuk masing-masing jenis ternak yaitu untuk sapi minimal 1.000 ekor sedangkan untuk kerbau minimal 500 ekor betina.

Untuk kawasan peternakan dikembangkan pada wilayah existing atau lokasi baru yang memiliki sumberdaya alam sesuai agroekosistem dengan lokasi dapat berupa hamparan atau *spot partial* (luasan terpisah) yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas yang baik dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengembangan ternak yang memadai. Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Riau dilaksanakan dengan pola integrasi ternak-perkebunan dan ternak-tanaman pangan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Selama periode 2014-2018, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupayakan secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau, setelah dilakukan diidentifikasi permasalahan maka permasalahan dihadapi dapat dilihat pada Tabel 2.2.3.

Tabel.2.3.2. .Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Produksi Daging Ruminansia Lokal rendah	Jumlah populasi ternak ruminansia rendah	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas
		Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Penerapan NKV rendah
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

3. Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan SDGs

Pembangunan global yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda pembangunan global periode 2016-2030 sebagai transformasi Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals (MDGs)* untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau turut berperan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama pada aspek Mengakhiri segala bentuk Kemiskinan Dimana Pun dan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Dari aspek kemiskinan, kemajuan yang dicapai Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan selaras dengan capaian RPJMN pada tahun 2015 sebesar 8-10%. Namun terhadap target RPJMD Provinsi Riau sebesar 7,90% pada tahun 2014 dan 7,38% pada tahun 2015 belum tercapai. Belum terwujudnya target penurunan angka kemiskinan oleh pemerintah Provinsi Riau sesuai target RPJMD, hal ini menunjukkan capaian perbaikan penanggulangan angka kemiskinan di Provinsi Riau belum efektif karena belum terfokus dan lokus pada bidang-bidang determinan kemiskinan serta belum tepat sasaran walaupun secara umum terjadi kondisi yang semakin membaik.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Riau terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 13,61% dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 8,17% pada tahun 2011. Sementara dalam enam tahun terakhir 2011-2016 kondisi kemiskinan di Provinsi Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2013 dan 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011. Peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun-tahun tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian makro yang berpengaruh terhadap beban hidup penduduk miskin, sehingga penduduk pada posisi hampir miskin dapat jatuh menjadi miskin. Dengan kata lain, kondisi perekonomian makro seperti inflasi

yang meningkat akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan makanan dan non makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat mengalami penurunan terutama pada komoditas pertanian yang berbasis ekspor. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 8,17% pada tahun 2011 menjadi 6,67% pada tahun 2016. Proporsi penduduk miskin di pedesaan lebih banyak yaitu 8,92% dan perkotaan sebanyak 6,90%. Jika diperhatikan bahwa tingkat beban hidup di Provinsi Riau menempati posisi ke-enam di Indonesia dengan Garis Kemiskinan Rp. 364.176 per kapita per bulan atau kebutuhan minimum bagi seorang industri untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena upaya penurunan angka kemiskinan terus harus dilakukan melalui program dan kegiatan dengan melakukan perbaikan terhadap komponen yang menjadi determinan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs goal menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan dengan: Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang berkualitas; Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan; Meningkatkan nilai tukar petani; Memperkuat sistem dan data informasi pertanian dan perkebunan; Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan; Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/raja, drainase, tanggul sungai dan pantai.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam periode RPJMD 2014-2019 antara lain terkait dengan: peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan peningkatan produksi hasil peternakan. Upaya peningkatan produksi pangan harus didukung oleh adanya kebijakan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas secara maksimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi & biosfer dan keberlanjutan masyarakat. Keberlanjutan ekologi & biosfer meliputi keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan sementara keberlanjutan masyarakat meliputi keberlanjutan cultural, keberlanjutan social, dan keberlanjutan politis serta keberlanjutan institusi. Oleh karena itu program dan kegiatan pembangunan bidang

penanganan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan harus tepat tujuan, sasaran dan strategi.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan khususnya terhadap ternak peliharaan.
- b. Belum tersedianya gedung Puskesmas di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- c. Produksi daging yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan khususnya terhadap ternak peliharaan.
- e. Para investor yang belum begitu berminat dalam berinvestasi pada sub sector peternakan, mengingat jenis peternakan mengandung resiko tinggi (*high risk*) terutama kualitas hasil produksi yang masih rendah.

Peluang :

- a. Melaksanakan program Upaya Khusus Siwab Daging (Sapi Induk Wajib Bunting), 2016 – 2020
 - b. Melaksanakan Program Gerakan Inseminasi Buatan (IB) Tahun 2016 – 2020 melalui kegiatan Sinkronisasi Inseminasi Buatan di 12 Kab/kota.
 - c. Komitmen Kepala Daerah yang kuat yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses program yang ditandatangani Gubernur, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD
 - d. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Peternakan.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program.

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

- Meningkatkan populasi ternak
- Mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan
- Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak

- Membangun kemitraan antar stekholder dalam mengembangkan komoditas unggulan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
- Meningkatnya penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal di masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD 2020 dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan peternakan. Analisis kebutuhan diperoleh dengan cara menguraikan semua hasil usulan yang disampaikan melalui tahapan Pertemuan forum PD dan Rapat Koordinasi Teknis yang telah dilaksanakan antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat fisik (utama) pembangunan peternakan.

Pada evaluasi program dan kegiatan Tahun 2018, tingkat capaian realisasi pada program dan kegiatan strategis belum tercapai target sasarannya. Tolok ukur inilah yang dipakai acuan untuk perencanaan tahun 2019 dan 2020 selain dari kegiatan rutinitas PD. Kebijakan peningkatan jumlah populasi ternak di tahun 2019 dan 2020 dengan meningkatkan jumlah kelahiran melalui Inseminasi Buatan, dan peningkatan produksi straw dan juga pengadaan ternak sapi yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan produksi juga untuk stok pengadaan ternak melalui sumber dana APBN, dengan harapan peningkatan jumlah populasi di Provinsi Riau, dengan adanya anakan yang berjenis kelamin jantan bisa meningkatkan produksi daging sehingga dapat mendukung program swasembada daging nasional.

Adapun kesesuaian antara RKPD dengan kebutuhan yaitu program dan kegiatan yang tertuang didalam Renja PD memuat dari berbagai usulan kegiatan rutin dinas yang menjadi urusan tupoksi dinas teknis dan usulan dari masyarakat yang tertuang didalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau dan usulan dari Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten dan Kota.

Dari hasil review, terdapat perbedaan antara pendanaan indikatif untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang ada pada Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan secara bersama dengan kabupaten kota. Pada Rancangan Awal RKPD jumlah pagu indikatifnya

sebesar Rp 35.899.231.000,- sesuai Analisis Kebutuhan sebesar Rp 79.702.189.500,-. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Riau (Tabel T-C.31)**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Usulan Pagu (Rp.)	
	Pertanian				35,899,231,000	Pertanian				79,702,189,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6,095,998,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6,319,498,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah Surat yang dikirim (Surat)	2.100 Surat	45,000,000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti	2.150 Surat	50,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar (rekening bulan)	48 Rekening Bulan	1,160,400,000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan (Rekening)	4 Rekening	1,200,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	76 Unit	76,600,000	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara (Unit)	92 Unit	250,000,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12 Bulan	294,500,000	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Disediakan (Orang/Hari)	2.640 Orang/Hari	295,500,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	45 Jenis	387,000,000	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)	45 Jenis	387,000,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Jenis laporan yang dicetak dan digandakan (Jenis)	45 Jenis	271,708,000	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Barang Cetak yang Disediakan (Jenis)	45 jenis	271,708,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	75 Jenis	80,000,000	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen listrik yang Disediakan (Jenis)	30 Jenis	82,500,000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Porsi)	12.550 Porsi	520,490,000	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi)	12.550 Porsi	520,490,000
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Pekanbaru	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	166 Kali	1,149,600,000	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pekanbaru	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	166 kali	1,149,600,000
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan (Orang Hari)	3.600 Orang Hari	308,000,000	10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor (Orang/Hari)	3.600 Orang/Hari	310,000,000
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan (Orang Bulan)	684 Orang Bulan	1,802,700,000	11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan (Orang Bulan)	684 Orang Bulan	1,802,700,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,381,850,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,470,350,000	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan kantor yang diadakan (Unit)	11 Unit	170,000,000	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang Diadakan (Unit)	23 Unit	250,000,000
2	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	35 Unit	180,100,000	2	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	35 Unit	180,100,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit	350,000,000	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	2 Unit	350,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pekanbaru	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara (Unit)	5 Unit	222,000,000	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara (Unit)	5 Unit	230,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8 Unit	214,500,000	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	8 Unit	215,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	208 Unit	245,250,000	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	208 Unit	245,250,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					7,861,400,000	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					10,023,630,000
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. RSH	UPT. RSH	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT. RSH (Unit)	7 Unit	1,000,000,000	1	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. RSH	UPT. RSH	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT. RSH (Unit)	10 Unit	1,550,000,000
2	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	UPT. RSH	Jumlah Pelayanan (Ekor)	1.744 Ekor	2,000,000,000	2	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	UPT. RSH	Jumlah Pelayanan (Ekor)	1.744 ekor	2,000,000,000
3	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Ternak yang Dilayani (Ekor)	108.000 Ekor	4,211,400,000	3	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Ternak yang Dilayani (Ekor)	108.000 Ekor	5,723,630,000
4	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah kasus yang ditanggulangi (Kasus)	2.200 Kasus	650,000,000	4	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah kasus yang ditanggulangi (Kasus)	2.200 Kasus	750,000,000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					20,559,983,000	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					61,888,711,500
1	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	12 Kab/Kota	Jumlah Ternak yang Di Inseminasi Buatan (IB)	29.800 Ekor	2,010,983,000	1	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	12 Kab/Kota	Jumlah ternak yang diinseminasi Buatan	29.800 ekor	3,300,000,000
2	Pengembangan Produksi Semen Beku	UPT. IBT	Jumlah produksi Semen Beku (Dosis)	24.000 Dosis	1,100,000,000	2	Pengembangan Produksi Semen Beku	UPT. IBT	Jumlah Produksi Semen Beku (Dosis)	24.000 Dosis	1,407,586,000
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan Ternak	UPT. IBT	Jumlah sarana dan prasarana produksi Inseminasi Buatan Ternak (Unit)	3 Unit	1,000,000,000	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan Ternak	UPT. IBT	- Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Inseminasi Buatan Ternak (Unit)	20 Unit	3,958,058,000
4	Penguatan Perbibitan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Ternak yang ber SKLB (ekor)	250 Ekor	600,000,000	4	Penguatan Perbibitan Ternak	12 Kab/Kota	- Jumlah Betina Produktif dan SKLB (Ekor)	250 Ekor	2,887,500,000
5	Pembinaan Ternak Ruminansia	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan (Orang)	77 Orang	1,200,000,000	5	Pembinaan Ternak Ruminansia	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan (Orang)	77 Orang	3,016,800,000
6	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah ternak yang disalurkan untuk model integrasi (Ekor)	168 Ekor	2,856,000,000	6	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah Ternak Model Integrasi Yang Memenuhi Skala Ekonomi (ekor)	945 Ekor	16,200,000,000
7	Pembibitan dan Perawatan Ternak	UPT. LPT	Jumlah ternak yang dipelihara (Ekor)	247 Ekor	750,000,000	7	Pembibitan dan Perawatan Ternak	UPT. LPT	Jumlah Ternak yang Dipelihara (Ekor)	250 Ekor	1,048,767,500
8	Pendistribusian Ternak Sapi Kepada Masyarakat	12 Kab/Kota	Jumlah ternak sapi yang didistribusikan (Ekor)	204 Ekor	3,468,000,000	8	Pendistribusian Ternak Sapi Kepada Masyarakat	12 Kab/Kota	Jumlah Ternak Sapi (Ekor)	765 Ekor	13,150,000,000
9	Pendistribusian Ternak Kambing	Bengkalis, Rohil, Siak, Kuansing,	Jumlah ternak kambing yang didistribusikan (Ekor)	180 Ekor	900,000,000	9	Pendistribusian Ternak Kambing	Bengkalis, Rohil, Siak, Dumai, Kampar, Rohul, Pekanbaru	Jumlah Ternak Kambing (Ekor)	660 Ekor	3,300,000,000
10	Pendistribusian Ternak Kerbau	Kampar, Inhu, Inhil, Kuansing	Jumlah ternak kerbau yang didistribusikan (Ekor)	40 Ekor	800,000,000	10	Pendistribusian Ternak Kerbau	Kampar, Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Rohil	Jumlah Ternak Kerbau (Ekor)	180 Ekor	3,600,000,000
11	Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah kelompok yang diverifikasi (Kelompok)	160 Kelompok	275,000,000	11	Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok yang Diverifikasi (Kelompok)	175 Kelp	350,000,000
12	Pengembangan Pakan Ternak	Inhu, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rohil, Pekanbaru	Jumlah unit pengolahan pakan yang disalurkan (unit)	13 Unit	1,000,000,000	12	Pengembangan Pakan Ternak	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah Produksi Pakan (Ton)	246.712 Ton	2,500,000,000
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pakan Ternak	UPT. LPT	Jumlah sarana prasarana UPT. LPT (Unit)	3 Unit	1,100,000,000	13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pakan Ternak	UPT. LPT	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT. LPT	5 Unit	2,000,000,000
14	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak	UPT. LPT	Jumlah produksi HPT (Ton)	3.875 Ton	1,200,000,000	14	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak	UPT. LPT	Jumlah Produksi HPT (Ton)	3.875 Ton	1,300,000,000
15	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah Petani dan Pelaku Usaha yang dilatih (Orang)	60 Orang	250,000,000	15	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah Petani dan Pelaku Usaha yang terlatih (Orang)	60 Orang	400,000,000
16	Pengawasan Penerapan NKV dan Penerapan PAH	12 Kab/Kota	Jumlah unit usaha yang menerapkan NKV (Unit Usaha)	19 Unit Usaha	700,000,000	16	Pengawasan Penerapan NKV	12 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan NKV (Unit Usaha)	19 Unit Usaha	710,000,000
17	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil, Bengkalis dan Dumai	Jumlah unit pengolahan limbah cair/padat (Unit)	13 Unit	700,000,000	17	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah Unit Pengolahan Limbah Cair/Padat (Unit)	30 Unit	1,500,000,000
18	Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau	12 Kab/Kota	Jumlah Polis AUTS/K (Polis)	3.000 Polis	650,000,000	18	Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau	12 Kab/Kota	Jumlah Polis AUTS/K (Polis)	5.000 Ekor	1,260,000,000

Dengan dilantiknya Gubernur yang baru, maka Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menyesuaikan dengan Visi Misi Gubernur, dimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berkewajiban mendukung terwujudnya Misi Ke tiga dari Gubernur yakni Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Kebijakan Gubernur yang menghendaki perampingan jumlah Program dan Kegiatan menjadikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Dengan demikian ada beberapa Program dan Kegiatan yang tidak dapat tertampung dan menyesuaikan dengan arah kebijakan Gubernur. Sehingga usulan Program, Kegiatan dan Pagu anggaran mengikuti kebijakan Gubernur Periode 2019-2024. Dan sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki 4 Program yang terdiri dari 2 Program Non Urusan dan 2 Program Urusan dengan jumlah kegiatan sebanyak 40.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020, disamping berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024, juga berdasarkan pada Forum PD Provinsi Riau Tahun 2019 dan melalui pembahasan Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota. Adapun program dan kegiatan tersebut tertuang di dalam usulan Rancangan Awal Renja PD pada tahun anggaran 2020.

Dari hasil Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari Tahun 2019 serta rekapan proposal yang masuk ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dapat diketahui besarnya permintaan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan bantuan ternak serta pelayanan kesehatan untuk ternak baik yang diajukan melalui Dinas Kabupaten/kota maupun yang diminta langsung oleh Kelompok Tani Ternak ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melalui proposal yang mereka ajukan. Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel T-C.32)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
I	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				
	1 Surveilans, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	12 Kab/Kota	Jumlah Laporan (Laporan)	5 Laporan	Kegiatan ini diakomodir pada kegiatan Pelayanan Kesehatan an Pencegahan Penyakit Hewan
	2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Ternak yang Dilayani (Ekor)	108.000 Ekor	Sesuai Tusi Dinas
	3 Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah kasus yang ditanggulangi (Kasus)	2.200 Kasus	Sesuai Tusi Dinas
II	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
	1 Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	12 Kab/Kota	Jumlah angka kelahiran	4.994 Ekor	Sesuai Tusi Dinas
	2 Penguatan Perbibitan Ternak	12 Kab/Kota	- Jumlah Betina Produktif dan SKLB (Ekor)	250 Ekor	Sesuai Tusi Dinas
	3 Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif	12 Kab/Kota	Terkendalnya Pemotongan Betina Produktif (%)	20 %	Belum dapat diakomodir pada kegiatan dinas
	4 Pengembangan Perbibitan Masyarakat	12 Kab/Kota	- Jumlah Kelompok Pembibitan Ruminansia dan Unggas (Kelompok)	26 Kelompok	Kegiatan tersebut diakomodir pada kegiatan Penguatan Perbibitan
	5 Pembinaan Ternak Ruminansia	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan (Orang)	77 Orang	Sesuai Tusi Dinas
	6 Pengembangan Agribisnis Peternakan	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah Ternak Model Integrasi Yang Memenuhi Skala Ekonomi (ekor)	945 Ekor	Sesuai Tusi Dinas
	7 Pendistribusian Ternak Sapi Kepada Masyarakat	12 Kab/Kota	Jumlah Ternak Sapi (Ekor)	765 Ekor	Sesuai Tusi Dinas
	8 Pendistribusian Ternak Kambing	Bengkalis, Rohil, Siak, Dumai, Kampar, Rohul, Pekanbaru	Jumlah Ternak Kambing (Ekor)	660 Ekor	Sesuai Tusi Dinas
	9 Pendistribusian Ternak Kerbau	Kampar, Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Rohul	Jumlah Ternak Kerbau (Ekor)	180 Ekor	Sesuai Tusi Dinas
	10 Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok yang Diverifikasi (Kelompok)	175 Kelp	Sesuai Tusi Dinas
	11 Pengembangan Pakan Ternak	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah Produksi Pakan (Ton)	246.712 Ton	Sesuai Tusi Dinas
	12 Pengawasan Penerapan NKV	12 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan NKV (Unit Usaha)	19 Unit Usaha	Sesuai Tusi Dinas
	13 Pengawasan Peredaran Produk Asal Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Produk Asal Hewan yang Terawasi (Unit Usaha)	35 Unit Usaha	Digabung pada kegiatan Pengawasan
	14 Peningkatan Kompetensi Petugas Lapangan Teknis Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan yang terlatih (Orang)	77 Orang	Belum dapat diakomodir pd kegiatan dinas
	15 Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Reproduksi	12 Kab/Kota	Jumlah SDM Pelayanan Reproduksi yang terlatih (Orang)	30 Orang	
	16 Peningkatan Kompetensi SDM Kelembagaan Kesehatan Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah SDM Kesehatan Hewan yang terlatih (Orang)	75 Orang	
	17 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesmavet	12 Kab/Kota	Jumlah SDM Kesmavet yang Bersertifikat (Orang)	131 Orang	
	18 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Peternakan	Kuansing, Inhu, Siak, Kampar, Rohul	Jumlah Unit Usaha Peternakan yang Dibina (Unit Usaha)	15 Unit Usaha	Sesuai Tusi Dinas
	19 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah Petani dan Pelaku Usaha yang terlatih (Orang)	60 Orang	
	20 Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah Unit Pengolahan Limbah Cair/Padat (Unit)	30 Unit	
	21 Pengembangan Kawasan Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Kawasan Peternakan (Kelompok)	30 Kelp	
	22 Akses Permodalan Kelompok Usaha Peternakan	12 Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Permodalan (Orang)	200 Orang	Belum dapat diakomodir pada
	23 Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau	12 Kab/Kota	Jumlah Polis AUTS/K (Polis)	5.000 Ekor	Sesuai Tusi Dinas
	24 Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Dumai	Jumlah Kelompok Ternak Bermitra yang Dibina	24 Kelp	Belum dapat diakomodir pada kegiatan dinas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi serta untuk menekankan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Untuk menindaklanjuti program tersebut, Kementerian Pertanian telah meluncurkan Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan yang menetapkan lima komoditas pangan strategis, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. Dari komoditas tersebut, yang perlu mendapat perhatian terbesar adalah komoditas (daging) sapi mengingat sampai saat ini impor daging dan sapi bakalan jumlahnya masih sangat besar. Dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan produksi daging di dalam negeri guna memenuhi permintaan konsumsi masyarakat Indonesia, mengurangi ketergantungan impor terhadap daging dan ternak bakalan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya ternak ruminansia, Kementerian Pertanian meluncurkan program Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab). Upsus SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka). Program tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri Pertanian pada tanggal 3 Oktober 2016. Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada sapi yang ditargetkan tercapai pada 2026 mendatang serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Rancangan kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) dengan target 4 juta akseptor, dengan sub kegiatan :
 - Operasional UPSUS SIWAB
 - Pelaksanaan Kegiatan IB
 - Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer
 - Penyediaan Pakan

- Penanggulangan Gangguan Reproduksi
 - Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
2. Pengembangan Sapi Perah dengan target 500 ekor, dengan sub kegiatan :
 - Penambahan Indukan
 - Uji Zuriat untuk peningkatan mutu Genetik
 - Rearing Unit (Pembesaran Pedet) di UPTD/koperasi
 - Penyediaan Pakan
 - Penerapan Kesrawan
 - Penaggulangan PHMS
 - Peningkatan Kualitas Susu
 3. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong dengan target 10.000 ekor, dengan sub kegiatan :
 - Penambahan Indukan
 - Penyediaan Pakan Berkualitas
 - Penanggulangan PHMS dan Gangguan Reproduksi
 - Penerapan Kesrawan
 4. Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) dengan target 240.000 RTM, dengan sub kegiatan :
 - Bimbingan Teknis
 - Penyediaan Kandang
 - Pengadaan Distribusi Ternak
 - Penyediaan Pakan Konsentrat Berkualitas
 - Penyediaan Obat-obatan dan Vaksin
 - Pendampingan dan Pelaporan
 5. Korporasi dengan target 5 kawasan dengan sub kegiatan :
 - Penguatan Kelembagaan
 - Penjaminan Mutu dan Keamanan Produk
 - Peningkatan Nilai Tambah dan daya Saing Produk
 - Peningkatan Status Kesehatan Hewan
 - Penguatan Pemasaran

6. Pengendalian, Penanggulangan dan Pembebasan Rabies dengan target 2.474.500 dosis dengan sub kegiatan :
 - Kajian Roadmap Pembebasan Rabies
 - Surveilans
 - Penyediaan Vaksin
 - Pengendalian Populasi Hewan Penular rabies (HPR)
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies
7. Pengendalian, Penanggulangan dan Pembebasan Brucellosis dengan target 131.150 dosis, dengan sub kegiatan :
 - Kajian Roadmap Pembebasan Brucellosis
 - Surveilans
 - Penyediaan Vaksin
 - Tes dan Slaughter
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Brucellosis

Bila ditelaah Rancangan Renja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 dengan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 terdapat keselarasan antara program dan kegiatan di Renja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan *sharing* kegiatan dikarenakan kegiatan tersebut belum ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau seperti kegiatan Bekerja dan Kegiatan Korporasi yang diharapkan kedepannya kegiatan tersebut dapat terlaksana di Provinsi Riau. Sedangkan Kegiatan Pengembangan Sapi Perah pengembangannya di Provinsi Riau kurang cocok karena iklim yang kurang mendukung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang melaksanakan salah satu urusan pilihan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang peternakan sesuai dengan kewenangan Provinsi dan tugas dinas teknis lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan maka misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2020–2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan peningkatan kinerja ASN dan pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 3 kepala daerah yakni pada misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi kepala daerah yang ketiga yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah yang berkaitan dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah dan sasaran menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mencapai sasaran dari misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. (Tabel T-C.32)

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan		NTUP Peternakan	111	113	115	117	119	121
		Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal (ton)	2.253,7	2.338,3	2.426,2	2.591,9	2.688,8	3,134,8
		Meningkatnya status kesehatan hewan	Prosentase Status kesehatan hewan (%)	94,8	95,1	95,4	95,6	95,7	96,0
2	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD	Nilai Sakip OPD	BB	BB	BB	A	A	A

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan peternakan dengan memperkuat pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Peternakan (NTUP Peternakan) dengan sasaran meningkatnya produksi daging dan meningkatnya status kesehatan hewan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut maka peningkatan produksi daging lebih dikhususkan dari ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging. Produksi daging dikhususkan pada ternak lokal akan menggambarkan kemampuan peternak untuk berproduksi, sehingga indikator keberhasilannya adalah angka produksi daging ruminansia lokal. Penekanan pada ternak ruminansia lokal karena saat ini secara nasional penyediaan daging masih menjadi permasalahan nasional, khususnya untuk kebutuhan daging pada hari besar dan penyediaan ternak kurban pada lebaran idul adha.

Peningkatan produksi daging dicapai dengan upaya menambah jumlah populasi ternak, meningkatkan kapasitas SDM bidang peternakan dan meningkatkan skala usaha peternakan. Peningkatan populasi pada ruminansia dilakukan dengan strategi meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan, meningkatkan keberhasilan kawin alam, meningkatkan jumlah dan kualitas bibit ternak dan pemenuhan pakan ternak. Sedangkan upaya untuk meningkatkan skala usaha peternakan adalah dengan peningkatan fasilitasi

permodalan kelompok usaha peternakan dan peningkatan usaha agribisnis peternakan melalui pemanfaatan limbah ternak dan pengembangan kawasan peternakan.

Usaha peningkatan produksi ternak harus diikuti dengan penanganan dan pengendalian penyebaran penyakit pada ternak. Upaya untuk pengendalian penyakit tersebut dilakukan dengan pemantauan penyakit hewan dan peningkatan pelayanan veteriner melalui pengembangan sarana dan prasarana UPT. RSH, pelayanan dan pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta dengan penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi.

Pengendalian juga dilakukan pada sektor hilir hingga pengolahan dan pemasaran pangan asal ternak ini. Untuk itu akan didorong para pelaku usaha produk peternak untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan produk pangan asal ternak sehingga aman, sehat utuh dan halal (ASUH).

Disamping itu dalam rangka mendukung Misi kelima dari kepala daerah yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan tujuan ke dua dari dinas yakni Meningkatkan Kinerja ASN dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses perencanaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Agar tujuan Gubernur dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat

berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama peningkatan pendapatan peternak.

Pengembangan peternakan di Provinsi Riau terutama ternak ruminansia ditinjau dari aspek sumberdaya lahan disarankan dengan pola pengembangan intensifikasi dan keterpaduan.

Pola intensifikasi dan keterpaduan tidak memerlukan lahan tersendiri yang khusus untuk pengembangan peternakan, namun dapat diintegrasikan dengan usaha lainnya, sehingga sangat tergantung pada penggunaan lahannya. Pada pola ini, pemeliharaan ternak tidak terlalu terpaku pada keberadaan lahan kosong. Keberadaan wilayah pengembangan peternakan terdapat di sentra-sentra pengembangan perkebunan dan tanaman pangan. Di wilayah perkebunan, keberadaan lahan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai tempat penanaman rumput pakan ternak sebagai tanaman sela dan pemanfaatan limbah agroindustry. Sedangkan di wilayah pengembangan tanaman pangan, limbah hasil pertanian merupakan penyedia hijauan pakan.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan terutama pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan seperti daging, telur dan susu. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan terhadap daging dan hasil ternak lainnya. Pemenuhan kebutuhan daging di Provinsi Riau sampai saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan. Kondisi ini menggambarkan masih terjadi kekurangan pasokan daging dan sekaligus menjadi peluang bagi pengembangan ternak di Provinsi Riau.

Dalam upaya untuk meningkatkan produksi daging, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Peternakan telah melaksanakan beberapa Program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan populasi ternak terutama sapi, kerbau dan kambing. Program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diantaranya adalah Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan dan Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Ternak.

Sesuai hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dan pembangunan peternakan di Provinsi Riau serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan

peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

a. Program Utama:

Dalam rangka mewujudkan misi ke-3 dari RPJMD Provinsi Rian Tahun 2014-2019, maka program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

b. Program Pendukung:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Penjabaran rincian rencana kegiatan tiap program pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel. 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 (Tabel. T-C.33)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.0.00.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	5.709.841.344			100 Persen	2.490.809.997
0.0.00.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim (Surat)	Pekanbaru	1.752 Surat	38.760.000	APBD		1.690 Surat	40.000.000
0.0.00.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar (rekening bulan)	Pekanbaru	36 Rekening	1.160.400.144	APBD		36 Rekening	360.000.000
0.0.00.02.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	Pekanbaru	12 Bulan	242.154.400	APBD		12 Bulan	282.500.000
0.0.00.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)	Pekanbaru	76 Unit	76.600.000	APBD		73 Unit	70.000.000
0.0.00.02.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Pekanbaru	38 Jenis	293.217.800	APBD		30 Jenis	210.823.997
0.0.00.02.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis laporan yang dicetak dan digandakan (Jenis)	Pekanbaru	43 Jenis	211.250.000	APBD		43 Jenis	257.486.000
0.0.00.02.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	Pekanbaru	24 Jenis	50.000.000	APBD		24 Jenis	50.000.000
0.0.00.02.01.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Porsi)	Pekanbaru	9.810 Porsi	284.559.000	APBD		9.400 Porsi	250.000.000
0.0.00.02.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	Pekanbaru	166 Kali	1.084.580.000	APBD		50 Kali	400.000.000
0.0.00.02.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan (Orang Bulan)	Pekanbaru	684 OB	1.770.200.000	APBD		684 OB	100.000.000
0.0.00.02.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan (Orang Hari)	Pekanbaru	3.600 OB	300.000.000	APBD		3.600 OB	295.000.000
0.0.00.02.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD (Persen)	Pekanbaru	11 Persen	198.120.000	APBD		9 Persen	175.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.0.00.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	820.230.000			100 Persen	578.450.000
0.0.00.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	Pekanbaru	35 Unit	167.680.000	APBD		10 Unit	50.000.000
0.0.00.02.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan (Unit)	Pekanbaru	7 Unit	180.000.000	APBD		2 Unit	85.000.000
0.0.00.02.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara (Unit)	Pekanbaru	0 Ruang	-	APBD		1 Ruang	120.000.000
0.0.00.02.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara (Unit)	Pekanbaru	5 Unit	178.250.000	APBD		5 Unit	121.500.000
0.0.00.02.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)	Pekanbaru	8 Unit	171.300.000	APBD		8 Unit	101.000.000
0.0.00.02.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	Pekanbaru	131 Unit	123.000.000	APBD		100 Unit	100.950.000
2.0.03.02.19.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Angka Kematian Ternak		3,4 Persen	7.823.092.098			3,1 Persen	9.333.559.997
2.0.03.02.19.001.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. RSH	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan (Unit)	Pekanbaru	22 Unit	981.543.098	APBD		10 Unit	1.500.000.000
2.0.03.02.19.002.	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah Pelayanan (Ekor)	12 Kab/Kota	1.744 Ekor	1.980.248.000	APBD		1.918 Ekor	2.099.999.999
2.0.03.02.19.003.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Ternak yang Dilayani (Ekor)	12 Kab/Kota	74.000 Ekor	4.211.396.000	APBD		76.000 Ekor	4.999.999.998
2.0.03.02.19.004.	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	Jumlah kasus yang ditanggulangi (Kasus)	12 Kab/Kota	2.200 Kasus	649.905.000	APBD		2.420 Kasus	733.560.000
2.0.03.02.20.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak		501.632 Ekor	19.921.667.434			519.341 Ekor	41.296.120.000
2.0.03.02.20.001.	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Ternak yang Di Inseminasi Buatan (IB)	12 Kab/Kota	29.800 Ekor	1.956.101.000	APBD		30.600 Ekor	3.630.000.000
2.0.03.02.20.002.	Pengembangan Produksi Semen Beku	Jumlah produksi Semen Beku (Dosis)	Pekanbaru	24.000 Dosis	1.012.664.000	APBD		39.000 Dosis	1.863.752.000
2.0.03.02.20.003.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan Ternak	Jumlah sarana dan prasarana produksi Inseminasi Buatan Ternak (Unit)	Pekanbaru	4 Unit	982.719.999	APBD		10 Unit	3.179.609.000
2.0.03.02.20.004.	Penguatan Perbibitan Ternak	Jumlah Ternak yang ber SKLB (ekor)	12 Kab/Kota	250 Ekor	560.571.000	APBD		255 Ekor	2.750.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.0.03.02.20.005.	Pembinaan Ternak Ruminansia	Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan (Orang)	12 Kab/Kota	847 Orang Bulan	1.198.535.000	APBD		924 Orang Bulan	3.638.800.000
2.0.03.02.20.006.	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah ternak yang disalurkan untuk model integrasi (Ekor)	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil	168 Ekor	2.813.155.000	APBD		324 Ekor	5.832.000.000
2.0.03.02.20.007.	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah ternak yang dipelihara (Ekor)	Kampar	200 Ekor	705.726.000	APBD		250 Ekor	1.310.959.000
2.0.03.02.20.008.	Pendistribusian Ternak Sapi Kepada Masyarakat	Jumlah ternak sapi yang didistribusikan (Ekor)	Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Meranti dan	204 Ekor	3.327.805.950	APBD		372 Ekor	6.696.000.000
2.0.03.02.20.009.	Pendistribusian Ternak Kambing	Jumlah ternak kambing yang didistribusikan (Ekor)	Bengkalis, Rohil, Siak, Kuansing,	180 Ekor	864.151.000	APBD		420 Ekor	2.100.000.000
2.0.03.02.20.010.	Pendistribusian Ternak Kerbau	Jumlah ternak kerbau yang didistribusikan (Ekor)	Kampar, Inhu, Inhil, Kuansing	40 Ekor	766.189.000	APBD		80 Ekor	1.680.000.000
2.0.03.02.20.011.	Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan	Jumlah kelompok yang diverifikasi (Kelompok)	12 Kab/Kota	160 Kelompok	273.400.000	APBD		193 Kelompok	385.000.000
2.0.03.02.20.012.	Pengembangan Pakan Ternak	Jumlah unit pengolahan pakan (unit)	Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota	13 Unit	999.000.000	APBD		17 Unit	1.500.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.0.03.02.20.013.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pakan Ternak	Jumlah sarana prasarana UPT.LPT (Unit)	Kampar	4 Unit	1.093.550.485	APBD		5 Unit	1.750.000.000
2.0.03.02.20.014.	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak	Jumlah produksi HPT (Ton)	Kampar	3.875 Ton	1.156.778.000	APBD		4.000 Ton	1.230.000.000
2.0.03.02.20.015.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan	Jumlah Petani dan Pelaku Usaha yang dilatih (Orang)	Pekanbaru	60 Orang	242.852.000	APBD		66 Orang	400.000.000
2.0.03.02.20.016.	Pengawasan Penerapan NKV dan Peredaran PAH	Jumlah unit usaha yang menerapkan NKV (Unit Usaha)	12 Kab/Kota	19 Unit Usaha	693.200.000	APBD		20 Unit Usaha	850.000.000
2.0.03.02.20.017.	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Jumlah unit pengolahan limbah cair/Padat (Unit)	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohil, Rohil, Bengkalis dan Dumai	13 Unit	658.000.000	APBD		30 Unit	1.650.000.000
2.0.03.02.20.018.	Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau	Jumlah Polis AUTS/K (Polis)	12 Kab/Kota	3.000 Polis	617.269.000	APBD		5.000 Unit	850.000.000
JUMLAH					34.274.830.876				53.698.939.994

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel.4.1. Rencana Program/kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja						Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
				Lokasi	Uraian	Target	Uraian	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.00.03.	PERTANIAN								34.274.830.876	53.698.939.994		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
0.0.00.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persentase pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%			5.709.841.344	2.490.809.997		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
0.0.00.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pekanbaru			Jumlah Surat yang dikirim (Surat)	1.752 Surat	38.760.000	40.000.000		
0.0.00.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			Pekanbaru			Jumlah rekening yang dibayar (rekening bulan)	36 Rekening	1.160.400.144	360.000.000		
0.0.00.02.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pekanbaru			Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12 Bulan	242.154.400	282.500.000		
0.0.00.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pekanbaru			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)	76 Unit	76.600.000	70.000.000		
0.0.00.02.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pekanbaru			Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	38 Jenis	293.217.800	210.823.997		
0.0.00.02.01.008.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pekanbaru			Jumlah Jenis laporan yang dicetak dan digandakan (Jenis)	43 Jenis	211.250.000	257.486.000		
0.0.00.02.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pekanbaru			Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang	24 Jenis	50.000.000	50.000.000		
0.0.00.02.01.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pekanbaru			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Porsi)	9.810 Porsi	284.559.000	250.000.000		
0.0.00.02.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Pekanbaru			Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	166 Kali	1.084.580.000	400.000.000		
0.0.00.02.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor			Pekanbaru			Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan (Orang Bulan)	684 OB	1.770.200.000	100.000.000		
0.0.00.02.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Pekanbaru			Jumlah tenaga satpam yang disediakan (Orang Hari)	3.600 OB	300.000.000	295.000.000		
0.0.00.02.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD			Pekanbaru			Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD (Persen)	11 Persen	198.120.000	175.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja						Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
				Lokasi	Uraian	Target	Uraian	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0.0.00.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%			820.230.000	578.450.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
0.0.00.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor			Pekanbaru			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	35 Unit	167.680.000	50.000.000		
0.0.00.02.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Pekanbaru			Jumlah peralatan kantor yang diadakan (Unit)	7 Unit	180.000.000	85.000.000		
0.0.00.02.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pekanbaru			Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara (Unit)	0 Ruang	-	120.000.000		
0.0.00.02.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Pekanbaru			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara (Unit)	5 Unit	178.250.000	121.500.000		
0.0.00.02.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pekanbaru			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)	8 Unit	171.300.000	101.000.000		
0.0.00.02.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pekanbaru			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	131 Unit	123.000.000	100.950.000		
2.0.03.02.19.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran		Persentase Angka Kematian Ternak (%)	3,4%			7.823.092.098	9.333.559.997		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.0.03.02.19.001.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. RSH			Pekanbaru			Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan (Unit)	22 Unit	981.543.098	1.500.000.000		
2.0.03.02.19.002.	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan			12 Kab/Kota			Jumlah Pelayanan (Ekor)	1.744 Ekor	1.980.248.000	2.099.999.999		
2.0.03.02.19.003.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak			12 Kab/Kota			Jumlah Ternak yang Dilayani (Ekor)	74.000 Ekor	4.211.396.000	4.999.999.998		
2.0.03.02.19.004.	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan			12 Kab/Kota			Jumlah kasus yang ditanggulangi (Kasus)	2.200 Kasus	649.905.000	733.560.000		
2.0.03.02.20.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran		Jumlah Populasi Ternak (Ekor)	501.632 Ekor			19.921.667.434	41.296.120.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.0.03.02.20.001.	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)			12 Kab/Kota			Jumlah Ternak yang Di Inseminasi Buatan (IB)	29.800 Ekor	1.956.101.000	3.630.000.000		
2.0.03.02.20.002.	Pengembangan Produksi Semen Beku			Pekanbaru			Jumlah produksi Semen Beku (Dosis)	24.000 Dosis	1.012.664.000	1.863.752.000		
2.0.03.02.20.003.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan Ternak			Pekanbaru			Jumlah sarana dan prasarana produksi inseminasi Buatan Ternak (Unit)	4 Unit	982.719.999	3.179.609.000		
2.0.03.02.20.004.	Penguatan Perbibitan Ternak			12 Kab/Kota			Jumlah Ternak yang ber SKLB (ekor)	250 Ekor	560.571.000	2.750.000.000		
2.0.03.02.20.005.	Pembinaan Ternak Ruminansia			12 Kab/Kota			Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan (Orang)	847 Orang Bulan	1.198.535.000	3.638.800.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja						Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
				Lokasi	Uraian	Target	Uraian	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.0.03.02.20.006.	Pengembangan Agribisnis Peternakan			Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil			Jumlah ternak yang disalurkan untuk model integrasi (Ekor)	168 Ekor	2.813.155.000	5.832.000.000		
2.0.03.02.20.007.	Pembibitan dan Perawatan Ternak			Kampar			Jumlah ternak yang dipelihara (Ekor)	200 Ekor	705.726.000	1.310.959.000		
2.0.03.02.20.008.	Pendistribusian Ternak Sapi Kepada Masyarakat			Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Meranti dan Kota Dumai			Jumlah ternak sapi yang didistribusikan (Ekor)	204 Ekor	3.327.805.950	6.696.000.000		
2.0.03.02.20.009.	Pendistribusian Ternak Kambing			Bengkalis, Rohil, Siak, Kuansing,			Jumlah ternak kambing yang didistribusikan (Ekor)	180 Ekor	864.151.000	2.100.000.000		
2.0.03.02.20.010.	Pendistribusian Ternak Kerbau			Kampar, Inhu, Inhil, Kuansing			Jumlah ternak kerbau yang didistribusikan (Ekor)	40 Ekor	766.189.000	1.680.000.000		
2.0.03.02.20.011.	Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan			12 Kab/Kota			Jumlah kelompok yang diverifikasi (Kelompok)	160 Kelompok	273.400.000	385.000.000		
2.0.03.02.20.012.	Pengembangan Pakan Ternak			Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru			Jumlah unit pengolahan pakan (unit)	13 Unit	999.000.000	1.500.000.000		
2.0.03.02.20.013.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pakan Ternak			Kampar			Jumlah sarana prasarana UPT.LPT (Unit)	4 Unit	1.093.550.485	1.750.000.000		
2.0.03.02.20.014.	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak			Kampar			Jumlah produksi HPT (Ton)	3.875 Ton	1.156.778.000	1.230.000.000		
2.0.03.02.20.015.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan			Pekanbaru			Jumlah Petani dan Pelaku Usaha yang dilatih (Orang)	60 Orang	242.852.000	400.000.000		
2.0.03.02.20.016.	Pengawasan Penerapan NKV dan Peredaran PAH			12 Kab/Kota			Jumlah unit usaha yang menerapkan NKV (Unit Usaha)	19 Unit Usaha	693.200.000	850.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja						Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
				Lokasi	Uraian	Target	Uraian	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.0.03.02.20.017.	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi			Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil, Bengkalis dan Dumai			Jumlah unit pengolahan limbah cair/Padat (Unit)	13 Unit	658.000.000	1.650.000.000		
2.0.03.02.20.018.	Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau			12 Kab/Kota			Jumlah Polis AUTS/K (Polis)	3.000 Polis	617.269.000	850.000.000		

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan peternakan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2019-2024 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan peternakan di Provinsi Riau. Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan peternakan.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Peternakan, Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah tahun 2019 guna merumuskan perencanaan tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renja ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 yang berpedoman dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Renja 2020 ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan adanya Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, maka penetapan prioritas pembangunan peternakan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini,

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020, Evaluasi Kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 dan upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan di Riau, diberbagai tingkatan pemerintahan maupun stakeholder terkait.